

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Kewenangan yang diterima pemerintah daerah salah satunya adalah menyusun sendiri kebijakan daerah, yang ditujukan sepenuhnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Pemerintah pada saat ini telah memberikan kebebasan kepada setiap pemerintahan di daerah, yang biasa disebut dengan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjadi babak baru terkait hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini memberikan wewenang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Taufan Maulamin bahwa “Masyarakat menginginkan kesejahteraanya dengan tuntutan masyarakat yang semakin kritis mengakibatkan pemerintah daerah harus menunjukkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik dan sebagai bentuk dari pelaksanaa APBD”.<sup>2</sup> Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut

---

<sup>1</sup> Taufan Maulamin, Agus Cholik, and Eneng Tuti Alawiah, “Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pengelolaan Anggaran Pada Instansi Pemerintah ( Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan , Pendapatan Dan Aset Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten ),” *Jurnal Transparansi* Vol. 1, no. 2 (2018): 259–82.

<sup>2</sup> Ibid, hal 259.

untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan berkualitas. Fungsi utama organisasi sektor publik, yaitu (1) melakukan pelayanan kepada publik, (2) mendefinisikan prinsip operasinonal masyarakat, (3) menyediakan pelayanan publik yang diperlukan karena tidak ada sektor swasta atau nirbala yang ingin menanganinya.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah khususnya disektor pendidikan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sigit Priyo Sembodo tentang sektor pendidikan, kutipan dari *The Influence Of Total Quality Managemen On Good Governance Through Commitment Organization*:

Pendidikan sebagai *leading sector* pembangunan manusia, memiliki peran yang sangat besar terhadap kualitas sumber daya manusia, dalam menghadapi perubahan sosial masyarakat baik secara nasional maupun skala global. Pendidikan sebagai fondasi dalam pembangunan bangsa harus dimulai dari langkah strategis dalam membenahan struktur tatalaksana dan budaya yang berkomitmen pada kemajuan. Pemenuhan akses dan mutu pendidikan yang berorientasi Global.<sup>3</sup>

Pendidikan menjadi skala global untuk yang dijadikan fondasi dasar dalam kehidupan pembangunan bangsa. Instrumen dan kebijakan yang bervisi jangka panjang, merumuskan target menembus persaingan dunia. Kesemuanya ini harus dipersiapkan sesegera mungkin, mengingatkan

---

<sup>3</sup> Fauzan, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah," *Modernisasi* Vol 10, no. No. 3 (2014): 158–69.

persaingan Global sudah harus di hadapi, *ASEAN Economic Community* sudah diberlakukan mulai akhir tahun 2015.

Persaingan antara lembaga pendidikan sangat kompetitif. Kondisi tersebut akan berimplikasi terhadap tuntutan lembaga pendidikan untuk selalu membangun keunggulan kompetitif, diferensi (Pembeda), pemutakhiran (Roadmap) bagi setiap lembaga yang akan berkelanjutan. Penentuan strategi kedepan, pengarahannya, pemusatan, dan komitmen di lembaga pendidikan<sup>4</sup>. Sesuai dengan tujuan pensisikan bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang diberikan tugas untuk mewujudkan pendidikan nasional sesuai dengan peran dan fungsinya. Pendidikan harus menekankan perannya dengan prinsip *good governance* agar mewujudkan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dengan optimal.

Tuntutan akan mutu dalam bidang pendidikan adalah suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari. Pencapaian mutu diperlukan metodologi yang tepat untuk implementasinya, dan pilihan itu adalah manajemen mutu terpadu (MMT) atau dikenal dengan *Total Quality Management* (TQM) dalam bidang pendidikan. Sektor pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat selama priode terakhir dalam perencanaan anggaran dan sistem pelaporan keuangan. Sektor pendidikan mendapat perhatian yang cukup serius karena pendidikan merupakan kunci semua bidang yang mendukung pembangunan hampir semua aspek.

---

<sup>4</sup> Arwildayanto Dkk, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*, ed. Ujang Kuswandi (Jawa Barat: Ikapi Jabar, 2017).

Sejalan dengan berkembangnya manajemen pendidikan, pengelolaan pendidikan lebih terarah dan terkoordinasi baik dari segi penyelenggaraan, pendanaan, pengembangan, dan pengawasan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Murisna tentang pengelolaan dana bantuan, kutipan dari Analisis Terhadap *Good Corporate Governance* Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kebijakan dalam pembangunan pendidikan meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>5</sup>

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah dan masyarakat. Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang merupakan tempat proses pendidikan dilaksanakan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis dan saling berkaitan. Oleh karena itu, sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan.<sup>6</sup> Selain pengelolaan ada juga perencanaan keuangan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan keuangan masa depan sekolah yang

---

<sup>5</sup> Murisna Dkk, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Luwu," 2020, 1–17.

<sup>6</sup> Andi Mulia Saleh, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dengan Partisipasi Anggaran Sebagai Variabel Intervening ( Studi Pada SMAN Di Kabupaten Wajo )" 1, no. 2 (2017): 97–120.

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan keadaan keuangan yang tersedia. Perencanaan keuangan sekolah tentunya dominan ke arah perencanaan keuangan yang terkait dengan pengelolaan pendidikan di sekolah. Keuangan sekolah dikelola menurut aturan petunjuk yang disediakan oleh pengambil kebijakan yaitu pemerintah. Aspek mendasar dari manajemen adalah perencanaan, dalam hal pembiayaan yang disebut penganggaran. perencanaan merupakan proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

Perencanaan pendidikan, antara lain menyatakan perencanaan pendidikan suatu penerapan yang rasional dianalisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat.<sup>8</sup> Pemerintah selaku pengelola di dalam negara dalam perencanaannya mengalokasikan anggaran pendidikan baik dari APBN dan APBD. Pemerintah telah memenuhi kewajiban untuk mengalokasikan anggaran pendidikan dengan ikut memasukkan gaji guru dan urusan pendidikan dari kementerian lain. Apalagi di pemerintah daerah justru belum banyak yang memenuhi kewajiban tersebut, meskipun kewenangan untuk urusan pendidikan sebenarnya telah disentralisasi oleh pemerintah

---

<sup>7</sup> Fauzan, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah."

<sup>8</sup> Endin, *Manajemen Anggaran Pendidikan*, Cetakan Pe (Jakarta Selatan: Yayasan Talibuana Nusantara, 2017) Hal. 60 .

daerah. Sampai saat ini dana transfer dari pemerintah menjadi andalan pendapatan APBD.<sup>9</sup>

Alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan termasuk gaji kependidikan namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan anggaran pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, yang diberikan kuasa kepenggunaan anggaran yaitu kepada masing-masing sekolah di bawah pemerintah daerah. Alokasi anggaran dapat memenuhi kebutuhan terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Dana pendidikan unsurnya dari APBD yang merupakan anggaran pendapatan belanja daerah. Pengalokasian anggaran pendidikan mengklarifikasi anggaran dari belanja menurut fungsi dan subfungsinya.<sup>10</sup>

Peran sekolah sebagai pengguna anggaran keuangan, yang berperan adalah kepala sekolah sebagai pimpinan dalam manajemen anggaran. Maka kepala sekolah harus lebih berhati-hati terhadap terjadinya fraud ini cukup besar. Pada kondisi ini diperlukan sikap etis dan perilaku etis dari kepala sekolah sebagai pengelola anggaran.<sup>11</sup> Setiap sekolah harus menerapkan prinsip tata kelola sekolah. Sekolah yang sudah menerapkan tata kelola yang baik yaitu sekolah yang telah memenuhi penilaian pada standart pembiayaan, yaitu dengan penilaian selama tiga tahun terakhir. Akreditasi

---

<sup>9</sup> Angwarmase, *Perencanaan Anggaran Pendidikan*, ed. Tim IPS (Bandung: YRAMA WIDYA, 2020).

<sup>10</sup> Harjoko Sangganagara, *Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan*, ed. Dadi J Iskandar, Cetakan Pe (Jawa Barat: Lepsindo, n.d.).

<sup>11</sup> Fauzan, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah."

merupakan proses penilaian sekolah termasuk pembiayaan yang meliputi rencana kerja anggaran (RKA). Pengelolaan anggaran dana sekolah baik dari unsur pemerintah ataupun dari masyarakat haru dikelola dengan *Good Governance School* yaitu dengan keterbukaan informasi (*Transparansi*), *Akuntabilitas*, *Tanggung Jawab (Responsibility)*, *Kemandirian (Independency)*, dan *Kewajaran (Fairness)*.<sup>12</sup>

Penerapan prinsip *Good Governance* di bidang pendidikan dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik bidang pendidikan hal ini dapat ditunjukkan oleh sekolah atas keberhasilan yang baik melalui penerapan prinsip supremasi hukum, sekolah dan para guru sudah lebih baik dalam menerapkan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sekolah sudah lebih transparan dalam menyampaikan kebijakan sesuai aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan (Rempowatu 2013).<sup>13</sup> Secara sederhana *Good Governance* model sekaligus praksis pemerintahan yang ditandai oleh adanya kerja sama/mitra antara pemerintah, warga, dan swasta dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, keadilan, dan visi strategis yang memiliki keberpihakan yang jelas dan tegas kepada aspirasi, kepentingan, kebutuhan, dan masalah warga, dengan mengutamakan kelompok warga yang tidak mampu (baik secara

---

<sup>12</sup> Dkk, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Luwu."

<sup>13</sup> Sigit Priyo Sembodo, "THE INFLUENCE OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT ON GOOD" 14, no. 1 (2016): 75–92.

ekonomi, sosial, maupun politik).<sup>14</sup> Implementasi *good governance* dalam pendidikan di sekolah adalah kerja sama *stakeholders* pendidikan (pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah) untuk mewujudkan pendidikan bermutu.<sup>15</sup> Pengelolaan sekolah harus benar-benar mengikuti prinsip tata kelola sekolah yang baik agar bisa mencerminkan sebagai sekolah yang sangat efektif di dunia pendidikan.

Penelitian ini memilih objek penelitian di salah satu sekolah di kabupaten Pamekasan yang terkenal dengan sekolah adiwiyata yaitu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Pamekasan. MAN 2 Pamekasan memiliki program-program sekolah yang direncanakan seperti layaknya program sekolah lainnya, baik di pendidikan umum maupun di pendidikan agama. Bahkan lebih uniknya lagi, di lembaga tersebut merupakan madrasah yang bekerja sama dengan Institut Teknologi Surabaya (ITS) dengan Program Diploma Satu Teknologi Ilmu Komputer (D1/PRODISTIK), program akademik ini bisa kita peroleh di MAN 2 Pamekasan, serta setiap program sekolah didukung oleh sarana bengkel sholat, laboratorium *Al-Qur'an*, dan program keterampilan (tata busana). MAN 2 Pamekasan terdapat program vokasi dan program *Islamic Boarding School* (*ma'had/asrama*) yang hampir mirip dengan program berbasis pondok pesantren. Sehingga dengan adanya program-program tersebut menjadi suatu keunggulan dari MAN 2 Pamekasan yang tidak dimiliki oleh sekolah lain, maka bisa menjadi suatu magnet untuk ketertarikan bagi calon

---

<sup>14</sup> Simon Sumanjoyo Hutagalung, *Tata Kelola Pendidikan Pada Daerah Atonomi Baru*, ed. Moh. Nizar (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017).

<sup>15</sup> Yohanes Wendelinus Dasor, "Good Governance," no. 10 (n.d.): 172–83.

peserta didik untuk masuk ke MAN 2 Pamekasan. Program-program sekolah yang sudah berjalan belum tersampaikan penuh informasinya kepada masyarakat, hal ini menjadi suatu kendala dalam mengenalkan sekolah kepada masyarakat.

MAN 2 Pamekasan sudah didominasi dengan memiliki penilaian kreditasi A, dapat disimpulkan MAN 2 Pamekasan telah menerapkan tatakelola untuk anggrannya dengan prinsip GCG yaitu keterbukaan informasi (*Transparansi*), *Akuntabilitas*, Tanggung Jawab (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*), apabila sudah memiliki penilaian akreditasi A. Tahapan penilaian akreditasi A yaitu sistem pengelolaan sudah menerapkan GCG dalam setiap pengelolaan anggaran baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Berdasarkan dari hasil prapenelitian yang dilakukan kepada salah satu pegawai bagian keuangan sekolah bahwa MAN 2 Pamekasan memiliki program-program sekolah yang direncanakan seperti layaknya program sekolah lainnya. Bahkan sekolah tersebut telah memiliki banyak siswa dan sekolah telah memiliki penilaian akreditasi A. Yang menjadi riset gap pada penelitian ini yaitu dokumen RKA telah menganggarkan item Pengembangan sarana dan prasarana, Pengembangan pendidik, Pengembangan tenaga kependidikan, Modal kerja/usaha, bahan habis pakai sekolah, perjalanan dinas, dan lain-lainnya.

Berbagai item penganggaran program kerja yang harus dilaksanakan, diantaranya Tetapi dengan tujuannya anggaran sekolah masih

ada beberapa program yang tidak sesuai dengan anggaran sekolah , yaitu tidak realisasinya dari setiap item anggaran. Penyebab ketidak sesuaian dan tidak bisa berjalannya program dikarenakan ada beberapa hal, diantaranya ketika penyusunan program dan anggaran keuangan hanya dilakukan oleh penguasa pengguna anggaran dan salah satu operator sekolah tanpa adanya musyawarah oleh warga sekolah seperti guru dan tenaga pendidik lainnya.”

Berdasarkan latarbelakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “**Analisis *Good School Governance* dalam Pengelolaan Anggaran pada MAN 2 Pamekasan**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang menjadi objek kajian pada penelitian ini agar terarah dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, adapun fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *good school governance* dalam pengelolaan anggaran pada MAN 2 Pamekasan?
2. Apa faktor yang menjadikan sekolah sebagai *good school governance* dalam pengelolaan anggaran pada MAN 2 Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan anggaran dengan *good school governance* pada MAN 2 Pamekasan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadikan sekolah sebagai *good school governance* dalam pengelolaan anggaran pada MAN 2 Pamekasan

#### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian yakni kegunaan secara teoritik dan kegunaan secara praktik sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pengetahuan untuk pengelolaan anggaran secara baik sesuai dengan peraturan pemerintah.

##### 2. Kegunaan Praktik

Adapun kegunaan secara praktik temuan penelitian di lapangan dapat memberikan informasi dan acuan secara khusus kepada berbagai pihak, utamanya:

###### a) Bagi Sekolah MAN 2 Pemakasan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh setiap sekolah untuk melaksanakan pengelolaan anggaran sekolah dengan berbasis *good school governance* sesuai peraturan pemerintah. Agar sekolah mencerminkan kinerjanya keuangan sekolah dengan baik.

###### b) Bagi Organisasi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk seluruh organisasi sekolah maupun organisasi sektor publik supaya lebih memperhatikan pertauran pemerintah untuk pengelolaan anggarannya dengan menggunakan prinsip *good corporate governance*, agar setiap organisasi menjadi lebih menunjukkan kinerja lebih bagus lagi.

###### c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk seluruh masyarakat agar bisa menilai pengelolaan kinerja anggaran dan keuangan sekolah maupun organisasi sektor publik.

### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari adanya kurang jelas pada penelitian ini, maka diperlukan penegasan istilah yang ada pada penelitian ini, diantaranya:

1. Anggaran adalah suatu komponen penting dalam perencanaan. Anggaran merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk mengarahkan langkah organisasi sektor publik di waktu yang akan datang dalam upaya mencapai tujuannya. Tanpa adanya penganggaran yang baik, pihak manajemen tidak dapat mewujudkan kinerja manajerial yang efektif dan efisien.
2. Pengelolaan Anggaran adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam anggaran ini hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan diperoleh, jadi anggaran harus rasional.<sup>16</sup>
3. *Good School Governance* (GSG) adalah sebuah perangkat pendukung untuk membentuk sebuah sekolah dengan tata kelola yang baik. menjelaskan bahwa terdapat tiga prinsip tata kelola sekolah yang baik

---

<sup>16</sup> Angwarmase, *Perencanaan Anggaran Pendidikan*.

yaitu *independensi, transparansi, akuntabilitas, responsibility, dan fairness*.<sup>17</sup>

## F. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan yang digunakan dalam penelitian ini, berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu :

1. Penelitian dari Fauzan dengan judul “Pengaruh *Penerapan Good Corporate Governance* Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah”.<sup>18</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah Akuntabilitas berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Transparansi yang paling dominan mempengaruhi pengelolaan dana BOS

2. Penelitian dari Murisna, Samsul Bachri, A. Dahri Adi Patra LA dengan judul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Luwu”.<sup>19</sup>

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penerapan good corporate governance

---

<sup>17</sup> Hendri Susanti, “Penerapan Good School Governance (GSG) Dan Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional (BOS) Sekolah Dasar Kota Blitar,” *Revitalisasi* 8, no. 1 (2019): 74–84.

<sup>18</sup> Fauzan, “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.”

<sup>19</sup> Dkk, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Luwu.”

terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di Kabupaten Luwu.

3. Penelitian dari Laksmi Mahendrati Dwiharja, Taufik Kurrohman dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Komite Sekolah”.<sup>20</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) berpengaruh positif terhadap partisipasi komite sekolah Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Patrang. Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) berpengaruh positif terhadap partisipasi komite sekolah Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Patrang.

4. Penelitian dari Hendri Susanti dengan judul “Penerapan *Good School Governance* (GSG) Dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Kota Blitar”.<sup>21</sup>

Berdasarkan analisa dan uji hipotesis yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa partisipasi stakeholder berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dan bantuan operasi-onal sekolah dasar di Kota Blitar,

---

<sup>20</sup> Taufik Kurrohman Laksmi Mahendrati Dwiharja, “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Komite Sekolah,” n.d., 182–94.

<sup>21</sup> Susanti, “Penerapan Good School Governance (GSG) Dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Bantuan Operasional (BOS) Sekolah Dasar Kota Blitar.”

Transparansi berpengaruh Positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dan bantuan operasi-onal sekolah dasar di Kota Blitar, akuntabiitas tidak berpengaruh postif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dan bantuan operasi-onal sekolah dasar di Kota Blitar. Selain itu, disimpulkan juga bahwa secara bersama-sama partisipasi stakeholder, transparansi, dan akuntabilitas berepengaruh postif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dan bantuan operasi-onal sekolah dasar di Kota Blitar.

**Tabel 1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fauzan	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	Sama-sama meneliti <i>Good Corporate Governance</i> di sekolah	Perebedaannya terdapat pada subjek penelitian yaitu pada penelitian fauzan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Pada penelitian ini menggunakan pengelolaan anggaran sekolah.
2	Murisna, Samsul Bachri, A. Dahri Adi Patra LA	Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Luwu	Sama-sama meneliti <i>Good Corporate Governance</i> di sekolah	Perebedaannya terdapat pada subjek penelitian yaitu pada penelitian Murisna, Samsul Bachri, A. Dahri Adi Patra Ls pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Pada penelitian ini menggunakan pengelolaan anggaran sekolah.
3	Laksmi Mahendrati Dwiharja,	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi	Sama-sama meneliti pengaruh	Perebedaannya terdapat pada subjek penelitian yaitu pada penelitian

	Taufik Kurrohman	Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Komite Sekolah	akuntabilitas dan transparansi	Laksmi Mahendradi Dwiharja, Taufik Kurrohman pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Pada penelitian ini menggunakan anggaran sekolah.
4	Hendri Susanti	Penerapan <i>Good School Governance</i> (GSG) Dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Kota Blitar	Sama-sama meneliti <i>Good School Governance</i> (GSG)	Perebedaannya terdapat pada subjek penelitian yaitu pada penelitian Hendri Susanti Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada penelitian ini menggunakan anggaran sekolah.